

---

**ANALISIS RELEVANSI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Weldi Salindeho<sup>1</sup>, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, Hendrik Manossoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

E-mail : [salindehow@gmail.com](mailto:salindehow@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the relevance of the report on the realization of the use of school operational assistance funds, the obstacles that hinder and the efforts to overcome the obstacles to financial management in North Halmahera Regency. This research method is exploratory qualitative research. Content analysis is used to analyze data consisting of data reduction, data display and conclusion drawing. The results show that the report on the realization of the use of school operational assistance funds in North Halmahera Regency is in part in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 1 of 2018 concerning Technical Instructions for School Operational Assistance. However, several obstacles were still found, such as transparency, human resources and communication. The efforts that must be made related to transparency are the creation of information boards as a form of accountability for reports on the realization of the use of school operational assistance funds. The efforts related to human resources are carried out by activities to increase the capacity of the School Treasurer and there are mentoring from the School Principal in preparing reports on the realization of the use of school operational assistance funds. The efforts related to communication is The Committee collaborates with the Principal in implementing mutually agreed programs in using school operational assistance funds.*

*Keywords: Realization report, regulation, constraints and efforts.*

**1. PENDAHULUAN**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi karakteristik : (a) dapat dipahami : kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera didapat dipahami oleh pemakai, (b) relevan : agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu, (c) andal : agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur, (d) dapat dibandingkan : para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Prastowo, 2014).

Relevansi adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, relevansi adalah

---

kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Informasi juga relevan dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah.

Sedangkan ketepatanwaktuan (*timelines*) adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Menurut Suwardjono (2005) mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (dalam Winidyaningrum, 2009). Dalam hal tertentu, ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling mengorbankan (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005).

Di Indonesia, laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, hal tersebut dilakukan agar informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat. Informasi yang bermanfaat merupakan informasi yang memiliki nilai. Informasi tersebut akan berguna jika memenuhi kriteria yang dikehendaki yang ada dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu terdiri dari (a) relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (b) andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (c) dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (d) dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna pada umumnya. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut : (a) manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, (b) manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, (c) tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, dan (d) lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Namun pada kenyataannya masih terdapat laporan keuangan mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan baik ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota maupun secara online ke sistem pelaporan yang disiapkan kemendikbud (Kasmini, 2017). Berbeda dengan Sari (2017), menyatakan masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan

---

Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 504 LKPD Tahun 2014 menunjukkan terdapat 5.978 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 5.993 kasus yang merugikan Negara senilai Rp. 3,20 triliun. Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, menyatakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah merupakan program Pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan Pemerintah non operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yakni SD, SMP, SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB yang pengalokasian dan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS. Tujuan BOS pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk : (1) Membantu penyediaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari Dana BOS, (2) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, (3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat, (4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan satuan biaya sebagai berikut : (1) SD sebesar Rp. 800.000,00 per 1 peserta didik per 1 tahun, (2) SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 per 1 peserta didik per 1 tahun, (3) SMA dan SMK sebesar Rp. 1.400.000,00 per 1 peserta didik per 1 tahun, (4) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 per 1 peserta didik per 1 tahun. Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan : membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Bukti Pengeluaran. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (Pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Sedangkan laporan Realisasi Penggunaan BOS merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan

---

komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (Pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (SD dan SMP) atau Tim BOS Provinsi (SMA, SMK dan SDLB/SMPLB,SMALB/SLB). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan, dan diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Disamping laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas Pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, dana BOS SD di Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari : 320 SD (193 SD Negeri 127 SD Swasta) serta terbagi ke dalam 17 Kecamatan, kembali menjadikan salah satu hasil temuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Ada 2 (dua) temuan yakni : (1) masih terdapat sekolah-sekolah yang terlambat dalam melaporkan laporan realiasi penggunaan dana BOS dan (2) ketidakpahaman bendahara sekolah dalam pembukuan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Relevansi laporan realisasi penggunaan dana BOS di Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat beberapa masalah yang harus dibenahi. Masih terdapat tunggakan tindaklanjut pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, disebabkan karena kurang proaktifnya obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis bagaimana relevansi laporan realisasi penggunaan dana BOS pada Kabupaten Halmahera Utara, (2) untuk menganalisis kendala-kendala yang menghambat relevansi laporan realisasi penggunaan dana BOS, (3) untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat relevansi laporan realisasi penggunaan dana BOS pada Kabupaten Halmahera Utara

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

***Teori Implementasi Kebijakan Publik.*** Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. Dua perspektif awal dalam studi implementasi didasarkan pada pertanyaan sejauh mana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yakni suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (bersifat *top-down*) atau dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksananya (*bottom-up*).

---

Dalam teori George C. Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

**Relevansi Laporan Keuangan.** Menurut Suwardjono (2005), relevansi adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, relevansi adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Informasi juga relevan dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah.

Bila dihubungkan dengan pemakai, Hendriksen dan van Breda (1992, hlm. 134) mengartikan relevansi dalam tiga aspek yaitu : relevansi tujuan (*goal relevance*) yaitu

---

kemampuan informasi dalam membantu para pemakai untuk mencapai tujuannya; relevansi semantik (*semantic relevance*) yaitu kemampuan informasi untuk dipahami maknanya oleh para pemakai sesuai dengan makna yang ingin disampaikan; dan relevansi keputusan (*decision relevance*) yaitu kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh para pemakai.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keterandalan adalah ciri-ciri yang memungkinkan para pemakai tergantung dan yakin kepada informasi tersebut. Keterandalan berarti bahwa berdasarkan semua keadaan khusus sekitar transaksi tertentu atau kejadian. Metode yang dipilih untuk mengukur dan/atau mengungkapkan efeknya menghasilkan informasi yang mencerminkan substansi dari kejadian atau transaksi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna pada umumnya.

Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

**Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).** Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: (i) laju pertumbuhan peserta didik; (ii) inflasi; (iii) pengembangan program dan perbaikan; dan (iv) proses pengajaran dan pembelajaran. (Saptari, 2015)

Laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (Pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Sedangkan laporan Realisasi Penggunaan BOS merupakan rekapitulasi

penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (Pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (SD dan SMP) atau Tim BOS Provinsi (SMA, SMK dan SDLB/SMPLB, SMALB/SLB). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan, dan diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Disamping laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas Pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian.** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*). Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Langkah-langkah atau proses penelitian kualitatif bersifat artistik, sehingga tidak baku, dan akan tergantung pada tujuan penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkonstruksi fenomena baru dan menemukan hipotesis. Bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode eksploratif dipandang sesuai, karena dalam pendekatan metode ini, penelitian yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Penelitian ini biasanya menggunakan penelitian eksplorasi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil lokasi di 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tobelo Tengah pada Kabupaten Halmahera Utara, yaitu SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu

**Sumber Data.** Data sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga hasil wawancara penelitian dengan nara sumber. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan kunci yaitu : Kepala Sekolah, Bendahara dan pihak lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan dana BOS. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Sugiyono, 2017) data sekunder yang telah diperoleh adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS perkomponen tahun 2016, 2017 dan 2018 baik

---

sekolah dasar yang berstatus Negeri maupun Swasta serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui situs internet, buku dan artikel

**Teknik Pengumpulan Data.** Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam pemilihan informan pada penelitian ini antara lain pertama, informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan sasaran fokus penelitian yaitu laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. Informan tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dalam laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Kedua, informan masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini pada sekolah-sekolah di Kecamatan Tobelo Tengah.

**Teknik Analisis Data.** Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan adalah : (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan. Di dalam pengujian keabsahan data, dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) dalam Sugiyono (2017).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas hasil temuan-temuan penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, yang sudah ditentukan dengan metode *purposive sampling* menggunakan alat perekam dan transkrip hasil wawancara. Selain itu, ada juga yang berbentuk dokumen/data seperti : Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Buku Kas Umum yang diperoleh itu dapat dilihat pada instrumen observasi penelitian dan profil informan terpilih yang sudah diuraikan sebelumnya. Hal ini menjamin validasi informasi yang disajikan.

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan permohonan penelitian sekaligus permohonan izin untuk mewawancarai informan serta permintaan data pendukung melalui kegiatan interview dan studi dokumentasi. Adapun proses dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu. Peneliti mengambil 3 (tiga) Sekolah ini dari jumlah total 9 (Sembilan) Sekolah karena disesuaikan dengan penelitian di mana ketiga sekolah tersebut ditemukan kendala-kendala dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyusunan RKAS merupakan prosedur awal dalam pengelolaan dana BOS yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS dengan memperhatikan komponen-komponen dalam JUKNIS kemudian disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah. Penetapan RKAS yang telah disepakati bersama dalam rapat ini kemudian disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan akan menetapkan RKAS yang telah disepakati untuk periode yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian di dalam RKAS dengan JUKNIS. Proses ini terjadi apabila Kepala Dinas Pendidikan menyatakan RKAS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKAS dikembalikan ke Sekolah untuk di perbaiki kemudian disahkan oleh Kepala Dinas

Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Kesepakatan penggunaan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah sesuai dengan JUKNIS

yang berlaku. Penggunaan BOS di sekolah selalu memperhatikan komponen-komponen pembelanjaan dalam JUKNIS sehingga semua dipenuhi pada waktu tertentu, untuk itu ada upaya sekolah untuk mengatasi kekurangan. Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban Lembaga pengelolaan keuangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah harus dicatat dan dilaporkan dalam hal ini oleh Bendahara ke dalam Buku Kas Umum dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS, kemudian disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit serta dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Tim BOS Kabupaten dan ke Laman BOS secara online.

#### **4.2. Pembahasan**

##### **Analisis Kesesuaian Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara**

**Perencanaan.** Penyusunan RKAS menjadi prosedur awal dalam penggunaan dana BOS kemudian disepakati bersama, untuk hasil penelitian ini terdapat kesesuaian untuk proses penyusunannya tapi tidak disebutkan batas waktu penyusunannya. Selanjutnya, penetapan rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang telah disepakati diserahkan oleh Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan akan menetapkan hasil rancangan Kerja dan Anggaran Sekolah untuk periode yang telah ditentukan, untuk hasil penelitian ini juga terdapat kesesuaian untuk proses penetapan tapi tidak disebutkan batas waktu penetapan RKAS tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian RKAS dengan peraturan perundang-undangan Kepala Dinas Pendidikan akan mengembalikan RKAS tersebut ke sekolah untuk dilakukan revisi, setelah itu Kepala Sekolah akan menyerahkan RKAS tersebut ke Kepala Dinas untuk disahkan dan digunakan pada periode tertentu. Hasil penelitian ke tiga yaitu proses penetapan RKAS oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, terdapat kesesuaian untuk proses penetapan RKAS tersebut tetapi tidak disebutkan batas waktu revisi.

Badrudin (2013) menyatakan bahwa perencanaan berasal dari kata rencana yaitu produk perencanaan, sedangkan perencanaan adalah proses penentuan rencana. Banyak perencanaan organisasi yang gagal gara-gara perencanaan yang tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi social, ekonomi, politik, maupun budaya masyarakat. Sedangkan menurut Buchari (2016) menjelaskan perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan persiapan masa depan kegiatan bisnis.

**Penggunaan.** Penggunaan yang dilakukan pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara BOS adalah membelanjakan dana BOS berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sekolah yang telah disepakati oleh Tim BOS Sekolah, dewan guru dan komite dengan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS pencairannya terlambat sehingga mengganggu bendahara dalam membelanjakan komponen-komponen dalam petunjuk teknis sehingga pihak sekolah melakukan upaya untuk melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah, proses belajar mengajar dan sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurmala Sari Soulisha (2017) dalam penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dana BOS sangat bermanfaat dalam operasional sekolah tapi jumlah anggaran dana BOS yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi.

Selanjutnya sejalan juga dengan penelitian Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati dan Rihandoyo mengemukakan dalam penelitiannya Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Semarang (studi kasus di sekolah menengah Pertama negeri semarang selatan tahun 2011) menyebutkan bahwa Penggunaan dana BOS

pada 13 komponen pembiayaan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) 37 tahun 2010 belum semuanya terpenuhi, yaitu di SMP N 37 yang hanya memenuhi 7 dari 13 komponen menggunakan dana BOS. Walaupun sudah mendapatkan dana BOS beberapa sekolah masih menarik iuran dari siswa, diantaranya untuk pembelian seragam pada saat mahasiswa baru, uang tambahan pelajaran (les) dan perpindahan saat kenaikan kelas.

**Pembukuan dan Pelaporan.** Pembukuan yang dilakukan pada SD GIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu yaitu kegiatan bendahara sekolah yang melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan atas kegiatan penggunaan dana BOS. Proses pembukuan yang dilakukan bendahara ini mulai dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas sekolah terkait kegiatan yang dilakukan berdasarkan RKAS serta mempertanggungjawabkan kas tersebut dengan membuat laporan pertanggungjawab setiap triwulan kepada Kepala Sekolah, terdapat kesesuaian pada proses pembukuan secara umum, tapi tidak disebutkan batas waktu pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya dalam pembelian dengan menggunakan dana BOS berdasarkan mekanisme dan melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dan dewan guru. Kegiatan pembukuan dalam penggunaan dana BOS juga harus menggunakan pencatatan pada beberapa jenis buku dalam laporan pencatatan Bendahara sekolah yaitu buku kas umum, terdapat kesesuaian pada 1 jenis buku laporan pertanggungjawab Bendahara Sekolah, tapi tidak menyebutkan buku pembantu kas, buku pembantu pajak dan buku pembantu bank.

Pembukuan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan : a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, b) Buku Kas Umum, c) Buku Pembantu Kas, d) Buku Pembantu Bank dan e) Buku Pembantu Pajak.

Selanjutnya proses pelaporan atas penggunaan dana BOS yang dilakukan pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu yang menyebutkan bahwa kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Sekolah untuk menyampaikan Realisasi Penggunaan Dana BOS disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten (Sekolah Dasar) dan menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Selanjutnya laporan penggunaan BOS dipublikasikan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat, hal ini terdapat kesesuaian pada proses penyampaian laporan, tapi tidak disebutkan waktu pelaporan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmad Hidayat dan Agus Suryono (2014) mengemukakan dalam penelitiannya Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS, di mana terkait mekanisme laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian di kedua sekolah SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo sama-sama mengimplementasikan sesuai petunjuk teknisnya. Tahapan dan bukti yang terkait pelaporan keuangan dana BOS seperti rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dan tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan dan waktu pelaporan sudah dilaksanakan, tersedia dan bisa ditemukan oleh peneliti di sekolah Hanya saja terdapat perbedaan dimana di SMPN 3 Palibelo dimana tidak ditemukan adanya buku pembantu bank dan buku pembantu pajak serta pernah terjadi keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini membuat implementasi kebijakan dana BOS terkait laporan keuangan belum diimplementasikan secara optimal.

---

---

## **Kendala-Kendala dalam Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Kabupaten Halmahera Utara**

**Kendala Transparansi.** Kendala transparansi dalam penyampaian laporan penggunaan dana BOS pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan dana BOS telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih terjadi dilapangan bahwa ada sekolah yang belum memanfaatkan papan informasi dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana BOS untuk dipublikasikan agar bisa diakses oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Hariswati (2015) dalam penelitiannya Analisa Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos menyebutkan bahwa Nilai transparansi pada satuan Pendidikan Perwanida muncul dari indikator skala prioritas tertinggi ketika pertanggungjawaban tersebut di publikasikan pada saat sosialisasi sebelum tahun ajaran baru sebesar 23,2%. Publikasi melalui kotak saran *call center*, facebook, twitter yang pada dasarnya untuk mempermudah akses Informasi mempunyai skala prioritas 22,3%. Indikator tersebut di atas menggambarkan bahwa nilai kepentingan transparansi dari skala prioritas tersebut di atas tidak begitu besar perbedaannya. Publikasi informasi laporan keuangan pada walimurid secara tertulis dalam bentuk lembaran melalui penerimaan rapor mempunyai nilai kepentingan sebesar 20%.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Subur Karyatun (2018) dalam penelitiannya Manajemen Keuangan Sekolah menyebutkan bahwa transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

**Kendala Sumber Daya Manusia.** Dalam menyampaikan laporan penggunaan dana BOS pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu dapat dinyatakan terhambat pada saat pelaporan penggunaan dana BOS karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan dan ketidakpahaman dalam menggunakan komputer atau laptop. Sehingga, sekolah selalu mencari orang yang bisa mengoperasikan komputer/laptop dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS. Selain itu juga tugas Bendahara dan Operator yang harus dikerjakan memiliki latar belakang Pendidikan sehingga tugas mereka bukan hanya untuk menyusun laporan penggunaan dana BOS tetapi harus masuk kelas untuk mengajar.

Buchari (2016) menjelaskan bahwa menempatkan orang pada tempatnya adalah sangat berperan penting dalam keberhasilan manajemen. Sebab jika Anda menyerahkan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah kehancurannya. Demikian pula dalam bisnis, jika ada pegawai yang tidak senang dengan pekerjaan yang ia lakukan, tidak senang dengan posisi di mana ia di tempatkan maka ia bukan saja tidak melakukan pekerjaan secara baik, akan tetapi ia akan menjadi pengganggu karyawan yang lain. Edwards III dalam Subarsono (2015:91) menjelaskan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsiten, tetapi apabila implemtor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implemntasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implemtor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bonita Regina, Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto (2015) dalam penelitiannya Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) menyebutkan bahwa

permasalahan umum yang muncul terkait dengan keterbatasan jumlah staf dalam program pemerintah adalah munculnya program atau tugas baru namun tidak diikuti dengan penambahan staf baru. Salah satu konsekuensi adanya keterbatasan staf adalah ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan secara langsung.

**Kendala Komunikasi.** Dalam pengelolaan dana BOS pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang renggang antara Kepala Sekolah dan Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di mana terdapat diskomunikasi terkait kegiatan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah bahkan dalam hal membuat laporan penggunaan dana BOS.

Danang dan Burhanudian (2015) menyatakan komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan organisasi. Fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai dengan pengawasan semuanya melibatkan komunikasi.

Edwards III dalam Subarsono (2015) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bonita Regina, Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto (2015) dalam penelitiannya Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) menyebutkan bahwa komunikasi yang terjadi antara dinas pendidikan kota Malang dengan sekolah sebagai obyek kebijakan berpotensi mengalami kegagalan, karena komunikasi yang bersifat satu arah, dimana pelaksana kebijakan menyampaikan dan menerapkan kebijakan yang dibuatnya tanpa adanya feedback dari sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan BOS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati dan Rihandoyo (2013) dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011) menyebutkan bahwa tingkat ketersediaan sarana informasi dan sosialisasi program BOS yang dilaksanakan masing-masing sekolah berbeda-beda. Sarana informasi dan sosialisasi program BOS yang digunakan antara lain : komunikasi langsung dengan masyarakat (dalam hal ini orang tua siswa) saat pembagian raport, pelaporan penggunaan dana BOS secara langsung di papan pengumuman sekolah maupun pelaporan kepada perwakilan orang tua siswa.

### **Upaya-Upaya dalam Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara**

**Upaya Mengatasi Kendala Transparansi.** Upaya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia, dan SD GMIH Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara dapat dinyatakan bahwa sekolah berupaya untuk melakukan transparansi terhadap laporan keuangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Upaya lain juga ada inisiatif Komite untuk melihat laporan tersebut sehingga dapat di sampaikan melalui papan informasi agar penggunaan dana BOS diketahui oleh orang tua sebagai bentuk transparansi terhadap penggunaan dana BOS.

**Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia.** upaya mengatasi kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu dapat dinyatakan bahwa bendahara membutuhkan kegiatan semacam peningkatan kapasitas bendahara terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Selain itu, untuk Dinas Pendidikan diwajibkan menganggarkan dalam APBD sejumlah biaya untuk pengadaan pelatihan peningkatan kapasitas bendahara sekolah.

**Upaya Mengatasi Kendala Komunikasi.** Upaya mengatasi kendala komunikasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SD GMIH WKO, SD Inpres Wosia dan SD GMIH Pitu dapat dinyatakan bendahara dan komite sangat ingin bersama-sama dengan Kepala Sekolah untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan Bendahara Sekolah agar dapat menyerahkan bukti-bukti laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah agar laporan keuangan tidak terlambat dilaporkan ke Dinas Pendidikan bahkan laporan secara online pada laman BOS. Kondisi lain juga terkait upaya untuk mengatasi kendala komunikasi ini yaitu Komite Sekolah telah berupaya mengusulkan ke Kepala Sekolah untuk melibatkan Komite dalam pelaksanaan program sekolah yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut. Dengan harapan bahwa Komite dan Sekolah dapat bekerja sama dengan baik dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Relevansi laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Operasional Sekolah disimpulkan bahwa proses perencanaan, penggunaan, pembukuan dan pelaporan Sebagian terdapat kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. beberapa ketidaksesuaian menimbulkan kendala-kendala dalam relevansi laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah yaitu transparansi, sumber daya manusia dan komunikasi. Oleh sebab itu, berdasarkan kendala-kendala tersebut dapat dikemukakan upaya-upaya yaitu (1) upaya transparansi, pihak sekolah akan memanfaatkan papan informasi sebagai sarana untuk menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk setiap tri wulan dalam 1 tahun penggunaan dana bantuan operasional sekolah, (2) upaya sumber daya manusia, sekolah dalam hal ini Bendahara membutuhkan kegiatan semacam peningkatan kapasitas Bendahara Sekolah terkait penyusunan laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah menganggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sejumlah biaya untuk pengadaan pelatihan peningkatan kapasitas Bendahara Sekolah, (3) upaya komunikasi, pihak sekolah dalam menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah terlambat, bendahara sekolah langsung memberitahukan ke Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Selain itu juga ada upaya dari Komite agar setiap kegiatan yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah agar melibatkan Komite agar pihak sekolah dan komite dapat bekerja sama dengan baik dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Disamping itu juga Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Inpres Wosia, SD GMIH WKO dan SD GMIH Pitu Kabupaten Halmahera Utara dapat dikategorikan terlaksana dengan cukup baik.

### **5.2. Saran**

Proses penggunaan dana bantuan operasional sekolah perlu dipahami lagi menyangkut laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah agar tidak terlambat sehingga akan berpengaruh pada pencairan dana BOS tri wulan berikutnya. Kegiatan pembukuan dan pelaporan perlu dipahami lagi menyangkut jenis laporan apa yang akan dilaporkan oleh Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dalam hal ini Tim manajemen BOS SD maupun ke laman BOS, untuk memperoleh kesesuaian dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Perlu ada pengawasan ketat terkait pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah lebih pro aktif untuk dapat memperhatikan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten. Karena hampir semua Bendahara belum paham tentang pokok-pokok dalam penggunaan dana

bantuan operasional sekolah, perlu dilakukan pelatihan khusus seperti peningkatan kapasitas Bendahara Sekolah.

Pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dalam melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sebaiknya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Karena hampir semua Bendahara belum paham tentang pokok-pokok dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah, perlu dilakukan pelatihan khusus seperti peningkatan kapasitas Bendahara Sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, S. 2014. Kebijakan publik. Jakarta: Pustaka Setia.
- Badrudin, B. 2013. Dasar-dasar manajemen. Bandung: CV Alfabeta
- Buchari, A. 2016. Pengantar bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hariswati, N. 2015. Analisa akuntabilitas dan transparansi tentang implementasi kebijakan pengelolaan BOS. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 75-88.
- Hidayat, R., & Suryono, A. 2014. Implementasi kebijakan penggunaan dana bos dan laporan keuangan BOS. *Reformasi Jurnal Ilmiah sosial dan Ilmu Politik*, 4(1). 34-43.
- Karyatun, S. 2018. Mengelola keuangan sekolah. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(54). 6257-6276
- Kasmini, N. W. A., Wirama, D. G., & Wirakusuma, M. G. 2017. Pengaruh pendidikan, kompetensi, kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi pada kinerja bendahara sekolah menengah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(01). 109-136.
- Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo, R. 2013. Implementasi kebijakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 171-178.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual.
- Prastowo. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Regina, B. 2015. Implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61-66.
- Saptari, Y. U. 2015. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Sari, A. P., Anisma, Y., & Rofika, R. 2017. Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan (Doctoral dissertation, Riau University).
- Subarsono, AG. 2015. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. Teori akuntansi perkerjasama pelaporan keuangan. Jogjakarta: BFE
- Winidyaningrum, C. 2009. Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
-